

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**YURNEDI**

**NPM : 1621020079**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**YURNEDI**

**NPM : 1621020079**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II : Dani Amran Hakim. S.H., M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, dan kawasan hijau pekarangan, Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Positif tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) khususnya ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena agama sebagai sumber nilai dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif bagi masyarakat sekitar dengan adanya ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling Kota

Bandar Lampung. Dan tinjauan hukum positif yaitu peraturan Undang–Undang yang berlaku hal ini dapat dilihat dari kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam mengelola dan mengatur ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, sedangkan untuk pengawasannya masih kurang efektif dan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar yang bisa merusak ruang terbuka hijau seperti pemasangan banner dengan paku di pepohonan.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yurnedi

NPM : 1621020079

Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 03 Juni 2021

Penulis



**Yurnedi**

**NPM: 1621020097**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif  
Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di  
Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung  
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar  
Lampung)**

**Nama : Yurnedi  
NPM : 1621020079  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**  
**NIP. 197411062000031002**

**Pembimbing II,**

**Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**  
**NIP. -**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)"** di susun oleh **Yurnedi, NPM: 1621020079**, Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 03 Juni 2021.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H.**

**Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.**

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H.**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. KH. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

طِالْوَزَتْ وَأَقِيمُوا ۖ الْمِيزَانَ فِي تَطْعُونَا ۖ لَا ۖ الْمِيزَانَ وَوَضَعَ رَفَعَهَا وَالسَّمَاءَ  
الْمِيزَانَ تُخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْ

*“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan,  
agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah  
keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi  
keseimbangan itu.” (Q.s. al-Rahman: 7-9).*





## PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat Syafaatnya. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mat Amin dan Ibundaku Saniah A.T, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, mengingatkan dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kepada kedua kakakku Iin Tajudin S.I.P dan Veronika S.Pd dan kepada keluargaku dimanapun berada terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Yurnedi seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Menggala Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya pada tanggal 30 November 1997 yang merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Mat amin dan Saniah A.T.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 3 Kupang Teba Teluk Betung Utara, lulus pada tahun 2010. Sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di SMP Perintis 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013. Sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di SMAN 4 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016. Terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercintaini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsiini.
6. Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsiini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan daerah provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yangdibutuhkan.

8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
10. Papah dan mamah yang selalu memberikan perhatiannya, doa, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
11. Uda dan Cici tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku di rumah (Iin Tajudin S.I.P dan Veronika S.Pd)
12. Adik-adik sepupuku yang berada di rumah (Ahmad Habib Yadi, Irma Sari A.T, Mara Sari A.T, dan Rayhan Akbar A.T.)
13. Sahabat-sahabatku anggota Sekabaran (Ferly, Rifqi, Sutan, Tito, Yudis, Ageng, Fahri, Noval, Sandi, Dohan, Geo, Dang, Dongah, Ewok)
14. Sahabat-sahabatku Kosan fc (Deby Reynaldo S.Pd, Muhammad Fathir, Bayu Prasetyo, Rendi Padli)
15. Senior-senior futsal atau abang-abangku (Muhammad Husen S.E, Deby Reynaldo S.Pd, Jamhari S.E, Hamdi Kurniawan S.E, Qurrota Aina Kutungga)
16. Sahabat-sahabatku di UIN terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas A yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. Sahabat-sahabat KKN ku (Nurul, Resa, Dini, Zahro, Desi, April, Titin, Ilham, Guntur, Riki, Bery)

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin YarobbalAlamin.

Bandar Lampung, 03 Juni 2021  
Penulis

**Yurnedi**  
**NPM 1621020079**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Signifikansi Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam .....	19
1. Pengertian Hukum Islam .....	19
2. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	19
3. Pemikiran Hukum Islam Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan... ..	20
B. Tinjauan Hukum Positif .....	22
1. Hukum Positif Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang .....	22



2.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan .....	25
3.	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah .....	27
C.	Ruang Terbuka Hijau .....	29
1.	Pengertian Ruang Terbuka Hijau.....	29
2.	Tujuan Ruang Terbuka Hijau .....	31
3.	Manfaat Ruang Terbuka Hijau .....	32
4.	Fungsi Ruang Terbuka Hijau kawasan Perkotaan.....	34
5.	Tipologi Ruang Terbuka Hijau .....	35

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A.	Gambaran Umum Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	37
1.	Sejarah Singkat Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	37
2.	Kondisi Fisik Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	38
B.	Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	40
1.	Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	40
2.	Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .....	41
C.	Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	41
1.	Jenis dan Persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	41
2.	Fungsi Dan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	42

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	47
B. Tinjauan Hukum Positif Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung .....	50

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	61
B. Rekomendasi .....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Nur Alika Fitriyani Wulandari.....	6
Tabel 2 Penelitian Fadelia Darmayanti.....	7
Tabel 3 Kondisi Lahan Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2019.....	39
Tabel 4 Komposisi Jumlah Penduduk Menurut, Jenis Kelamin, dan <i>Sex Ratio</i> di Kecamatan Kemiling Tahun 2019.....	39



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Kemiling Tahun 2019 .....	38
---	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Hukum yang sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam atau syariat Islam, ialah suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>
3. Hukum Positif yaitu dapat disebut juga *ius constiutum* yang berarti asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>3</sup>
4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah Proses Ruang Terbuka Hijau di area memanjang atau jalur dan atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2003), h. 189.

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern*, (Jakarta, 2014), h. 20.

<sup>3</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1990), h. 439.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Kesimpulan dari penegasan judul tersebut ialah Tinjauan Hukum Islam yang dimaksud adalah menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Positif menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, yang berada di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan.<sup>5</sup>

Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, dan kawasan hijau pekarangan.<sup>6</sup>

Dari segi sosial, ruang terbuka hijau dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk bersosialisasi, adanya fasilitas yang ada di ruang terbuka hijau yang disediakan dapat dijadikan masyarakat untuk berolahraga, berekreasi, maupun tempat untuk berkumpul.

Maraknya pembangunan sebuah kota, dapat ditandai dengan munculnya berbagai fasilitas yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan kota tersebut seperti perumahan, fasilitas umum, restoran, sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain, bertambahnya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

<sup>6</sup> Roswidyatmoko Dwihatmojo, *Ruang Terbuka Hijau yang semakin terpingkirkan*, <http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakin>  
 Terpingkirkan jurnal diakses pada tanggal 16 Maret 2020

yang membuat permintaan lahan terus bertambah, Adanya pembangunan kota membuat ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini menurun dan telah digantikan dengan lahan terbangun, padahal adanya ruang terbuka hijau dapat menghasilkan udara bersih yang bermanfaat untuk masyarakat.

Selain itu, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang membahas tentang Peduli Lingkungan berdasarkan firman Allah SWT.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Artinya: “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al A'raf Ayat 56).<sup>7</sup>*

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan sekitar, salah satu lingkungan alam dalam hal ini berarti ruang terbuka hijau dapat tetap dijaga dan dilestarikan dan tidak hilang akibat adanya lahan terbangun. Kawasan kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan masyarakat Provinsi Lampung.

Menurut Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 05/ PRT/ M/ 2008 tentang kebutuhan ruang terbuka hijau, proporsi ruang terbuka hijau yang dibutuhkan pada wilayah perkotaan adalah minimal sebesar 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Sedangkan Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), h. 128.

menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.<sup>8</sup>

Pengelola ruang terbuka hijau publik idealnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah Daerah bisa memperoleh sumber lahannya dari aset pemda sendiri, pihak swasta, atau masyarakat. Untuk saat ini, yang merupakan ruang terbuka hijau publik milik Pemkot Bandar Lampung yakni Lapangan Kalpataru Kemiling, Lapangan Baruna Ria Panjang, Kawasan Register Batu Putu, dan ruas median jalan yang ditumbuhi pepohonan,<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menjawab permasalahan yang sudah dipaparkan terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung khususnya di kecamatan kemiling menjadi sebuah Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung”.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah adalah proses dan hasil pengenalan masalah. Dengan kata lain identifikasi masalah merupakan salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lainnya. Masalah penelitian akan menemukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara suatu atau lebih variabel pada suatu fenomena.

Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai konsep antara sesuatu dengan yang lainnya. Batasan masalah

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor 5 Tahun 2008, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Pemerintah Daerah atau Pemkot

adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih berfokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus dilakukan.

Batasan masalah pada penelitian ini adalah hanya menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di kecamatan kemiling kota bandar lampung.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung.?
2. Bagaimana tinjauan hukum hukum Positif terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tinjauan hukum Islam tentang penegelolaan ruang terbuka hijau di kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung.
2. Tinjauan hukum Positif Islam terhdap pengelolaan ruang terbuka hijau di kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teorititis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman dalam memahami bagaimana fungsi dari ruang terbuka hijau.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1  
Penelitian Nur Alika Fitriyani Wulandari

Nama,Tahun,Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Nur Alika Fitriyani Wulandari (2017) dengan judul “Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang Tahun 2000-2015	Menganalisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang 2000-2015	Metode Kuantitatif Deskriptif	Ketersediaan Ruang terbuka hijau di kota serang pada tahun 2000 diketahui yaitu seluas 11.840 ha. Dalam kurun waktu 15 tahun terjadi perubahan luas ruang terbuka hijau dikota serang. Pada tahun 2015 luas raung terbuka hijau yaitu sebesar 8.165 ha yang berupa taman, hutan, sempadan sungai, sepadan jalan, kebun campuran, pertanian, lapangan olahraga, pemakaman dan hijau pekarangan. Ketersediaan ruang terbuka hijau di kota serang mengalami penurunan dalam kurun waktu 15 tahun. Mulai dari tahun 2000 seluas 11.840 ha dan pada tahun 2015 luas ruang terbuka hijau menjadi 8.165 ha dengan selisih perubahan yaitu seluas 3.675 ha. Persebaran ruang terbuka hijau yang ada dikota serang tidak merata disemua kecamatan. <sup>10</sup>

<sup>10</sup> Nur Alika Fitriyani Wulandari, (UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi, 2017)



Tabel 2  
Penelitian Fadelia Damayanti

Nama, Tahun , Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
Fadelia Damayanti (2017) dengan Judul “ Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016”	Menganalisis Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Tahun 2016	Metode Deskriptif Kualitatif	<p>Persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling terbagi di 23 lokasi di delapan kelurahan di Kecamatan Kemiling tersebar di Kelurahan Kemiling Raya, Kelurahan Beringin Jaya, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Sumberejo, Kelurahan Sumberejo Sejahtera.</p> <p>Kecamatan Kemiling memiliki enam jenis Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Permendagri No.1 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang di Perkotaan. Yaitu: Ruang Terbuka Hijau Taman Lingkungan Perumahan, Hutan Lindung, Lapangan Olahraga, Bentang Alam gunung, Jalur pengaman median jalan, dan Pemakaman Umum.</p> <p>Luas ruang terbuka hijau di Kecamatan Kemiling adalah 486,69 ha atau 19,42% dari keseluruhan wilayahnya yaitu 2.505<sup>11</sup></p>

---

<sup>11</sup> Fadelia Damayanti, (Universitas Lampung: Skripsi, 2017)

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Alike Fitriyani Wulandari

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Alike Fitriyani Wulandari yakni sama-sama meneliti Ruang Terbuka Hijau

Perbedaanya terletak pada judul terdapat kata analisis dengan tinjauan, dan peneliti meneliti di Kecamatan Kemiling, sedangkan di penelitian Nur Alike Fitriyani Wulandari di Kota Serang, peneliti menggunakan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan Penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Persamaan dan Perbedaan antar penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadelia Damayanti

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadelia Damayanti yakni sama-sama meneliti Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Perbedaanya terletak pada judul terdapat kata tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam sedangkan di penelitian Fadelia Damayanti tidak menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Post.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali di kacaukan dengan prosedur penelitian,<sup>12</sup> hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit dibedakan.

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau

---

<sup>12</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 26.

biasa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara memahami bahan dari berbagai literature yang berhubungan dengan penataan Ruang Terbuka Hijau.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer informasi yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>16</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, cetakan kesatu, 2019), h. 15.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka cipta, Cetakan kedua, 1993), h.309.

<sup>15</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 40.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 40.

dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.<sup>17</sup> Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah aparat kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Penataan Lingkungan, Sekretariat, Kasi Inventarisasi RPPLH, Upt Laboratorium, Pol PP, Kasi Kerusakan Lingkungan, Kasi Pemantauan Lingkungan, Kasi Pencemaran Lingkungan, Kasi Pemeliharaan Lingkungan, Program, Keuangan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Dinas Lingkungan Hidup.) yang berjumlah 152 orang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>19</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *quota sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan teknik tertentu *quota sampling* merupakan teknik penentuan sampel atas populasi

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), h. 173.

<sup>18</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 53.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010), h. 116.

tertentu untuk diklasifikasikan sesuai ciri khas hingga mencapai jumlah kuota yang dibutuhkan.<sup>20</sup>

Oleh karena itu sampel yang digunakan penelitian adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu, untuk menghasilkan sampel yang dianggap mewakili populasi. Adapun Sampel pada penelitian ini terdiri dari Seksi Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, alasan sampel tersebut diambil karena dianggap mewakili populasi.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Observasi (Pengamatan)**

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.<sup>21</sup> Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>22</sup>

Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap ruang terbuka hijau di kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung menurut tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

##### **b. Metode Wawancara (Interview)**

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 122.

<sup>21</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015), h. 105.

<sup>22</sup> Burhan Sungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011), h.118.



responden.<sup>23</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan *interview* pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditunjukan kepada aparat kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup>

Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>25</sup> Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995), h. 192.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen .....*, h. 274.

<sup>25</sup> Burhan Sungin, *Penelitian .....*, h. 125.

## 5. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya:

### a. Tahapan *Editing*

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *Editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses *Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

### b. Sistematika Data (*Sistematising*)

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data- data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh

## 6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir induktif.

Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kecamatan kemiling Kota Bandar Lampung.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penulis akan menjelaskan mengenai sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang membahas mengenai tinjauan hukum Positif dan hukum Islam tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

BAB III berisi objek penelitian yang berupa gambaran umum mengenai Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dan peran serta ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup mengenai Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV berisikan analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Kemiling serta tinjauan hukum Positif dan hukum Islam mengenai Ruang Terbuka Hijau.

BAB V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan akhir dari jawaban rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Sebagai agama universal dan menyeluruh, yang tidak hanya melulu mengatur masalah ritual ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat Muslim, mulai dari perkara kecil hingga besar seperti persoalan cinta, zakat, shalat fardhu, pembagian warisan, pernikahan dan banyak lagi. Untuk itulah fungsi utama 5 rukun Islam dan 6 rukun iman yang senantiasa diamalkan oleh kaum Muslimim sangatlah vital.

Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Quran mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. <sup>26</sup>

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah SWT dan Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem

---

<sup>26</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No 2, 2017), h. 31

ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesamanya.

Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>27</sup>

## **2. Sumber-Sumber Hukum Islam**

Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). Sebagian besar pendapat ulama ilmu fiqih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum islam yaitu : ijma, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, ray'yu, dan 'urf.<sup>28</sup>

## **3. Pemikiran Hukum Islam Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan**

Hukum Islam, memiliki prinsip-prinsip tentang alam semesta ini, alam merupakan sebuah entitas yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang lain yang ghaib, yang menciptakan alam. Alam sekaligus merupakan representasi dari yang maha menciptakan dan yang maha benar, yang merupakan sumber keberadaan alam itu

---

<sup>27</sup> *Ibid* h. 31.

<sup>28</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Sudarsono, 2005), h. 13.

sendiri.<sup>29</sup> Realitas alam ini diciptakan dengan tujuan tertentu dan dengan benar (*haq*), bukan karena kebetulan atau main-main atau *bathil*.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ  
كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ۚ

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataan-Nya di waktu Dia mengatakan: 'Jadilah, lalu jadilah', dan di tangan-Nya-lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-An'âm [6]:73).

Oleh karena itu, alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (*qadar*) bagi alam, yang dalam bahasa agama sering pula disebut sebagai hukum Allah (*sunnatullâh*).<sup>30</sup> Sunnatullah ini tidak hanya berlaku bagi benda-benda alam, akan tetapi berlaku juga bagi manusia, sedangkan dalam bahasa hukum positif disebut sebagai kebenaran ekologis (*ecological truth*).<sup>31</sup>

*Ecological truth* adalah kebenaran yang didasarkan pada sesuatu yang diyakini bahwa, manusia adalah bagian dari proses

<sup>29</sup> Muhjiddin Mawardi, *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama*, <http://www.UniversitasMuhammadiyahSurakarta.com>. diakses tanggal 1 Desember 2020

<sup>30</sup> Abdullah Mudhofir, *Alquran & Konsevasi Lingkungan, Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Sya'riah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 131.

<sup>31</sup> Matin Abdul Ibrahim, *Greendeen: Inspirasi Islam dalam Menjaga dan Mengelola Alam*, (Jakarta: Zaman, 2019), h. 98.

ekologis. Tanpa alam, tanpa makhluk hidup lain, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Kalau manusia melakukan kerusakan alam, niscaya akan terjadi gangguan kehidupan dan akan berdampak pada ekonomi. Kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat pasti akan berpengaruh pada stabilitas politik penyelenggaraan negara. Inilah basis kebenaran ekologis (*ecological truth*).<sup>32</sup>

Dalam pemikiran Islam, manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam, dan sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah untuk saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya sesuai dengan peran masing-masing. Manusia mempunyai peran dan posisi khusus diantara komponen alam dan makhluk ciptaan Allah yang lain yakni sebagai *khalifah*.<sup>33</sup> Sebagaimana dalam firmanNya

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنٌ نُّسِیْجٌ یَّحْمَدُكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. “Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”. Tuhan berfirman: Sesungguhnya, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Q.s. al-Baqarah [2]: 30).

<sup>32</sup> Arief Hidayat dan FX Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, h.17.

<sup>33</sup> M.Thalhah dan Achmad Mufid, “*Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci (Jawaban Islam atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warming)*, (Yogyakarta: Total Media, 2018), h. 19.

Berdasarkan hal ini maka manusia adalah wakil Allah dan pemimpin di bumi (Q.s.al-An'âm:165.<sup>34</sup> Maha bijaksanaan Allah, telah menentukan (mentakdirkan) bahwa antara satu makhluk dengan lainnya dalam ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Saling keterkaitan dan saling membutuhkan ini melahirkan suatu keseimbangan yang dinamis (*a dynamic balance*), yang dengan keseimbangan ini keberlanjutan kehidupan di alam bisa terjaga. Pemikiran ini adalah suatu pemikiran yang terus dikembangkan dan saat ini menjadi trend dunia untuk perbaikan kesalahan cara pandang manusia dalam mengelola alam ini, Naess dalam teorinya menyebut sebagai *deep ecology*.

*Deep ecology*, menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat hanya pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Etika tidak ini tidak mengubah sama sekali hubungan antara manusia dengan manusia, yang baru adalah manusia bukan lagi pusat dari dunia moral. *Deep ecology* memusatkan perhatian pada semua spesies, termasuk spesies bukan manusia. Singkatnya, *deep ecology* memusatkan pada *biosphere* seluruhnya, demikian pula tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

Berdasarkan tentang kesatuan sistem dalam alam ini, maka tindakan eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, kesalahan cara pemanfaatan dan kerusakan sumberdaya alam merupakan pelanggaran terhadap ketentuan (*taqdîr*) Allah. Pandangan sempit, untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan tindakan tak bertanggung jawab lainnya pada umumnya akan mengganggu kesetimbangan dinamik yang telah diatur oleh Allah sebagaimana dalam firmanNya

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿١﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٢﴾ وَأَقِيمُوا  
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٣﴾

---

<sup>34</sup> Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Indonesia, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, 2011, h. 61.



Artinya: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (Q.s. al-Rahman [55]: 7-9).

Dengan demikian perlindungan terhadap sumberdaya alam dari pencemaran dan atau perusakan merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di muka bumi (Q.s. al-A’raf: 56). Fungsi penting yang kedua yakni fungsi kebutuhan bagi semua makhluk dalam penciptaan alam, merupakan landasan untuk melahirkan atau mengembangkan asas legal perlunya tindakan konservasi sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan. Alam dengan segala sumberdayanya memang telah diciptakan Allah untuk melayani kebutuhan manusia, dan Tuhan telah menundukkan alam kepada manusia sebagaimana dalam firman-Nya :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “Dia lah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di bumi ini untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan Dia Maha Mengetahui segalanya. (QS. Al Baqarah: 29).

Ketundukan alam terhadap manusia atas perintah Tuhan ini bukan bermakna bahwa manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam tanpa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Ketundukan alam ini sebenarnya untuk menggambarkan atau memberi peringatan kepada manusia bahwa Allah berperan dalam proses kejadian alam dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini.

Alam ditundukkan kepada manusia, juga menyiratkan pesan bahwa manusia memang menjadi pemimpin (*khalifah*) bagi alam (bumi), dan kepemimpinannya ini juga atas kehendak dan

campur tangan Allah SWT.<sup>35</sup> Hal penting lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan alam ini adalah bahwa alam dengan segala sumberdaya alamnya, bukan hanya untuk melayani atau memenuhi kebutuhan manusia saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya.

Hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang dikembangkan berdasarkan konsep penciptaan alam ini dengan demikian harus secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa segala sumberdaya ciptaan dan atau anugerah Allah diperuntukkan bagi semua makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia.

Dengan kata lain semua makhluk hidup yakni manusia, hewan maupun tumbuhan, mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan karunia Allah yang berupa sumber daya alam. Manusia diperkenankan untuk memanfaatkan sumberdaya alam untuk mempertahankan hidup dan melanjutkan kehidupannya serta untuk kemaslahatan umum akan tetapi tidak boleh berlebihan, berbuat aniaya (*dzâlim*) dan berbuat kerusakan (*fasad*) di atas bumi. Pesan ini berkali-kali diulang oleh Allah Swt dalam kitab suci Alquran.<sup>36</sup>

Lebih penting lagi dari hal-hal yang telah di sebutkan diatas, bahwa alam diciptakan adalah sebagai tanda (ayat) atas ke Maha Kuasaan dan belas kasih Allah. Fungsi utama penciptaan alam ini perlu ditegaskan karena sebagian manusia melengahkan bahkan mengingkari peran Allah dalam penciptaan alam. Mereka berpandangan bahwa alam ini terjadi karena sebab-sebab yang tersendiri, secara alamiah dan tidak ada campur tangan Allah. Mereka lupa bahwa tanpa sebab-sebab “yang lebih tinggi” sebab-sebab alamiah dalam proses pembentukan dan perkembangan alam tidak akan pernah ada.

---

<sup>35</sup> Sukarni, *Islam dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2019).

<sup>36</sup> Muhjiddin Mawardi, *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama*, <http://www.UniversitasMuhammadiyahSurakarta.com>. diakses tanggal 1 Desember 2020

## **B. Tinjauan Hukum Positif**

### **1. Hukum Positif Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Penataan Ruang ditujukan untuk menyeraskan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang. Tata ruang sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.

Keselarasan atau keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Penyelenggaraan penataan ruang dijelaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1, bahwasannya meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan Pasal, 12 dan 13 sudah menjelaskan secara detail tentang pengaturan dan pembinaan dalam penataan ruang yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kabupaten untuk kepentingan masyarakat.

Kendala-kendala dalam proses penataan ruang dilihat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah:

- 1) Pemanfaatan ruang lebih dinamis dan kompleks, termasuk yang dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat sendiri.
- 2) Masyarakat harus terus waspada mengamati dan mengontrol proses-proses pemanfaatan ruang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam menentukan arah pembangunan dan pemanfaatan ruang di suatu wilayah, dibutuhkan sebuah rencana penataan ruang yang menjadi acuan bersama bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Urgensi keberadaan rencana penataan ruang semakin meningkat tanpa perencanaan yang matang, pembangunan akan terjadi secara sporadis, tidak teratur dan bisa jadi malah menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Upaya menghindari hal tersebut ditambah keinginan untuk menciptakan lingkungan yang layak tinggal dan berkelanjutan menjadi motivasi wilayah untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana penataan ruang. Penataan ruang perlu dilakukan disebabkan karena:

1. Jumlah penduduk, percepatan urbanisasi dan kebutuhan akan lingkungan kota/permukiman–efisiensi sumber daya.
2. Pembangunan perkotaan/permukiman semakin berskala besar dan kompleks.
3. Keterbatasan lahan, khususnya di Jawa –konflik dengan area produktif pertanian;
4. Pembangunan kota/permukiman bersifat permanen dan mempunyai dampak jangka panjang.
5. Ruang mempunyai keterbatasan tertentu.
6. Perubahan lahan/tata ruang mempunyai dampak tidak saja fisik, melainkanmelainkan juga sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>38</sup>

Penyusunan rencana penataan ruang dilakukan dengan berazaskan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup Kota dan kaitannya dengan Provinsi dan Kota/kecamatan sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah juga harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.

Berikut ini penjelasan dari asas penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang:

- 1.Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan
- 2.Keselarasan atau keserasian adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan
- 3.Kerberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- 4.Kerberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- 5.Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
- 6.Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- 7.Pelindungan kepentingan hukum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan-perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat di pertanggung jawabkan baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.<sup>39</sup>

Rencana penataan ruang wilayah dapat menjadi fungsi koordinasi dan pengendalian dengan munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan masa depan, dan dalam upaya mengurangi fragmentasi sektoral dan fungsional. Penataan Ruang ditujukan untuk menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang.

Lebih lanjut, penataan ruang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yaitu dalam bentuk memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan, sehingga keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai.<sup>40</sup>

## **2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 (Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan)**

Dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan harus mampu memenuhi luasan ruang terbuka hijau publik minimal 20% sesuai amanat Undang-

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh karena itu diperlukan inventarisasi, serta data akurat terkait jumlah dan pemetaan ruang terbuka hijau di perkotaan serta perubahan kondisi ruang terbuka perkotaan sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan dan keputusan bagi para *stakeholder* terkait. Pengembangan ruang terbuka hijau dan tutupan vegetasi sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kenyamanan di wilayah perkotaan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang tinggi dan nyaman.

Dasar pengembangan ruang terbuka hijau terhadap pengembangan wilayah perkotaan yang berkelanjutan peran ruang terbuka hijau disuatu wilayah perkotaan, maka secara tidak langsung peran ruang terbuka hijau sangat esensial dalam membangun suatu wilayah kota yang sehat dan berkelanjutan. Pelaksanaan pengembangan Kota Hijau merupakan salah satu langkah nyata Pemerintah untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang, terutama terkait ruang terbuka hijau publik sekaligus perlindungan terhadap sumber daya alam di Indonesia berikut kehidupan yang berada di dalamnya

Fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (atau disingkat Permen PU Ruang Terbuka Hijau) menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi perkotaan fungsi utama (*Intrinsik*) sebagai fungsi Ekologis dan fungsi tambahan (*Ekstrinsik*) sebagai fungsi sosial budaya, fungsi estetika dan fungsi ekonomi.<sup>41</sup>

Direktorat Jenderal Penataan Ruang-Kementerian Pekerjaan Umum bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mencanangkan

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Pemerintah Daerah atau Pemkot

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) guna memenuhi ketetapan UUPR, terutama terkait ruang terbuka hijau publik, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. Program pengembangan Kota Hijau memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas Ruang Kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten. Tujuan lain dari program ini adalah meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan.

### **3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah**

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.<sup>42</sup>

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan penataan ruang tersebut, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Penataan Ruang itu sendiri meliputi: (i) Perencanaan tata ruang, (ii) Pemanfaatan ruang, dan (iii) Pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>43</sup>

Perencanaan tata ruang suatu wilayah haruslah memperhatikan keberlangsungan di masa depan. Mengingat rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan kebijakan yang berlaku dalam jangka waktu lama. RTRW amatlah penting, bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi suatu daerah, tetapi juga keberlangsungan lingkungan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dalam menyusun tata ruang wilayah haruslah memperhatikan berbagai aspek termasuk lingkungan hidup.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Nomor 7

<sup>43</sup> Mulyono Sudyohutomo, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 6.



Saat ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan merevisi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 terkait RTRW tahun 2011—2030 dan tengah melakukan konsultasi publik. Dengan RTRW yang baru, Pemkot mengupayakan peningkatan kualitas dan perwujudan ruang yang berwawasan lingkungan. Bandar Lampung memiliki daerah perbukitan dan pesisir dengan luas daratan 197,22 km<sup>2</sup>, luas daerah pesisir 56,57 km<sup>2</sup>, dengan garis pantai mencapai 27,01 km. Namun, semua belum dikelola dengan baik. Padahal, sumber daya alam merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Dalam menyusun RTRW tentunya bukan hanya memperhatikan potensi alam, melainkan juga memperhatikan konservasi lingkungan. Seperti keberadaan ruang terbuka hijau, kawasan resapan air, juga kegiatan reklamasi menjadi aspek-aspek penting yang harus diperhatikan. Bukan hal yang baru jika bukit-bukit di Bandar Lampung terus menghilang. Ada yang terus digerus untuk penambangan batu, dibangun kawasan perumahan, hingga menjadi tempat wisata.

Beberapa tahun lalu, Kota Tapis Berseri memiliki 33 bukit, tetapi kini hanya tersisa tiga bukit yang kondisinya masih baik, yakni Bukit Banten, Bukit Sulah, dan Bukit Kucing. Hal itu menyebabkan ruang terbuka hijau di Bandar Lampung terus berkurang. Adapun puluhan bukit lainnya sudah digerus dan beralih fungsi untuk permukiman, pertambangan, dan tempat wisata. Sebut saja Bukit Camang, Kuniyit, Sukadanaham, Klutum, Randu, Perahu, dan Tamin. Terakhir, Bukit Sindi di Jalan Iman Bonjol yang digarap menjadi tempat wisata, meski semestinya menjadi ruang terbuka hijau.

Semestinya kondisi itu menjadi pertimbangan dalam penyusunan Perda RTRW. Namun, RTRW juga bukan sekadar sketsa di atas kertas yang dibubuhi tanda tangan pejabat daerah untuk legalitas, aturan itu haruslah benar-benar dipatuhi. Kita semua berharap RTRW yang disahkan kelak benar-benar memperhatikan ketahanan pangan dan konservasi

lingkungan. Ini amat penting untuk keberlangsungan hidup di masa depan. Jangan sampai bobroknya penyusunan RTRW menimbulkan kerugian amat besar di kemudian hari yang bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga menelan korban jiwa.<sup>44</sup>

Dalam kajian Peraturan Daerah berkaitan dengan subjek penelitian yaitu Ruang Terbuka Hijau maka Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 terkait RTRW harus memperhatikan Ruang Terbuka Hijau di setiap daerah untuk kelestarian lingkungan dan penecemaran udara dan resapan air untuk mencegah bencana alam.

## C. Ruang Terbuka Hijau

### 1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik (open spaces) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH). Beberapa pengertian RTH diantaranya:

- a. Suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu) atau sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Rencana Tata Ruang Wilayah Harus Peduli Lingkungan” (Online), tersedia di :<https://www.lampost.co/berita-rtrw-harus-peduli-lingkungan.html> (2 Desember 2020)

<sup>45</sup> Purnomo Hadi, *Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*, (Bogor: Disertasi Pascasarjana IPB Bogor, 2017)

- b. Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Pasal 1 Butir 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan).

Di dalam pengaturannya RTH juga dapat disebut dengan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP), seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP). Dalam Permendagri ini, yang dimaksud dengan RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.<sup>46</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang Terbuka Hijau adalah suatu ruang terbuka yang kawasannya didominasi oleh vegetasi baik itu pepohonan, semak, rumput-rumputan, serta vegetasi penutup tanah lainnya, kawasan ini didirikan berdasarkan kebutuhan dan peruntukkan dalam wilayah tersebut. Tidak hanya untuk menjaga dan menyeimbangkan kondisi lingkungan atau ekosistem sekitarnya, tetapi juga menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas sosial yang memadukan dengan estetika alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, pengertian ruang terbuka hijau adalah ruang memanjang/ jalur atau mengelompok

---

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

## 2. Tujuan Ruang Terbuka Hijau

Dengan adanya ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan memiliki berbagai macam tujuan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, tujuan penyelenggaraan ruang terbuka hijau adalah:

- 1) Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.
- 2) Menciptakan aspek *planologis* perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan.
- 3) Alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
- 4) Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.<sup>47</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, tujuan penataan ruang terbuka hijau adalah:

- 1) Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan
- 2) Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan
- 3) Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.<sup>48</sup>

Menurut Nirwono dan Iwan Ismaun, tujuan pembangunan ruang terbuka hijau merupakan sebagai infrastruktur di wilayah perkotaan yaitu dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

perkotaan yang nyaman, segar dan bersih, sebagai sarana lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alami dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan menciptakan kota yang sehat, layak huni dan berkelanjutan.<sup>49</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data base dan sistem informasi yang menunjukkan jumlah, lokasi, luasan dan prosentase perkembangan luasan ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Kemling Kota Bandar Lampung. Mendapatkan gambaran dan data informasi (baik berupa Peta maupun Database) mengenai pemanfaatan ruang baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka non hijau di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Mendapatkan gambaran dan informasi (baik berupa Peta maupun Database) mengenai penggunaan lahan sesuai dengan jenis klasifikasi ruang terbuka hijau yang digunakan (Permen PU Ruang Terbuka Hijau).

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai tujuan ruang terbuka hijau, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang penting yang harus ada disebuah perkotaan. guna meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, ruang terbuka hijau dapat menghasilkan udara yang bersih, menjaga ekosistem maupun sebagai daerah resapan air sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir. Oleh karena itu keberadaan ruang terbuka hijau dapat menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah perkotaan.

### **3. Manfaat Ruang Terbuka Hijau**

Keberadaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan selain memiliki fungsi yang beragam, juga memiliki manfaat penting bagi sebuah Kota. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dijelaskan ruang terbuka hijau memiliki beberapa manfaat, yaitu:

---

<sup>49</sup> Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30% ! resolusi (kota) hijau*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) , h. 97.

- 1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah).
- 2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangible*), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).<sup>50</sup>

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 dijelaskan mengenai manfaat ruang terbuka hijau, yaitu:

- a) Sarana untuk mencerminkan identitas daerah.
- b) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan.
- c) Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial.
- d) Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan.
- e) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah.
- f) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula.
- g) Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat.
- h) Memperbaiki iklim mikro.
- i) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau yang ada di sebuah kota memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan masyarakat yang berada di sebuah kota, baik itu manfaat langsung seperti mendapatkan udara yang bersih dan sehat, sarana untuk bersosialisasi, beraktivitas sosial dan manfaat tidak langsung yaitu untuk memperbaiki iklim mikro dan meningkatkan cadangan oksigen

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya dalam waktu pendek, tetapi juga jangka waktu yang panjang.

#### 4. Fungsi Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Fungsi RTHKP berdasarkan Permen PU No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan adalah:

- a. Fungsi utama (*intrinsik*) yaitu fungsi bio-ekologis (fisik):
  - 1) Memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota)
  - 2) Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar
  - 3) Sebagai peneduh
  - 4) Produsen oksigen
  - 5) Penyerap air hujan.
- b. Fungsi tambahan (*ekstrinsik*) yaitu fungsi sosial:
  - 1) Fungsi sosial dan budaya: menggambarkan ekspresi budaya lokal; Merupakan media komunikasi warga kota: tempat rekreasi wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan penelitian dalam mempelajari alam.
  - 2) Fungsi ekonomi
  - 3) Sumber produk yang bias di jual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur-mayur
  - 4) Bisa dijadikan bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
  - 5) Fungsi estetika meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro halaman rumah, lingkungan pemukiman, maupun makro lansekap kota secara keseluruhan, menstimulasi kreatifitas dan produktifitas warga kota pembentuk faktor keindahan arsitektural menciptakan suasana serasi dan seimbang antara areal terbangun dan tidak terbangun.<sup>52</sup>

Dalam penataannya, fungsi ini dapat dikombinasikan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, kepentingan dan keberlanjutan kota.

---

<sup>52</sup> *Ibid*

Adapun manfaat RTH menurut Permendagri No.1 Tahun 2007 adalah:

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah
- b. Saran penelitian, pendidikan dan penyuluhan
- c. Sarana interaksi aktif dan pasif serta interaksi social
- d. Meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan
- e. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat
- h. Memperbaiki iklim mikro
- i. Meningkatkan cadanga oksigen di perkotaan.<sup>53</sup>

### 5. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, membagi RTH dalam tipologi berikut:

- a. Berdasarkan fisik  
Berdasarkan fisik, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi:
  - 1) RTH Alami RTH alami adalah RTH yang terdiri dari habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional.
  - 2) RTH Non Alami/Binaan RTH non alami/binaan adalah RTH yang terdiri dari taman, lapangan olahraga, makam, dan jalur-jalur hijau jalan
- b. Berdasarkan fungsi  
Berdasarkan fungsinya, RTH dapat berfungsi sebagai :
  - 1) Fungsi Ekologis RTH berfungsi ekologis merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik. Secara ekologis, RTH dapat meningkatkan kualitas airtanah, mencegah banjir,

---

<sup>53</sup> *Ibid*



mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, dan sempadan sungai.

- 2) Fungsi Sosial Budaya secara sosial budaya, RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial dan sarana rekreasi. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun raya, dan TPU.
  - 3) Fungsi Arsitektural/Estetika secara arsitektural, RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.
  - 4) Fungsi ekonomi secara ekonomi melalui pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan (*urban agriculture*) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.
- c. Berdasarkan struktur ruang  
Berdasarkan struktur ruang, RTH dapat dibedakan menjadi:
- 1) RTH dengan pola ekologis: merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, tersebar.
  - 2) RTH dengan pola planologis merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. Berdasarkan segi kepemilikan  
Berdasarkan segi kepemilikan, RTH dapat dibedakan menjadi:
- 1) RTH Publik: RTH yang dimiliki secara pribadi
  - 2) RTH Privat: RTH yang merupakan ruang public atau fasilitas umum.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ibrahim, Matin, *Greendeen: Inspirasi Islam dalam Menjaga dan Mengelola Alam*, (Jakarta: Zaman, 2019)
- Aprianita, wawancara dengan penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 10 Februari 2020
- AS, Susiadi *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2015)
- , *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Badan Pusat Statistik, (Kecamatan Kemiling dalam angka Tahun, 2019)
- Damanhuri, Djamil, *Kesatupaduan Manusia dan Alam*, (Bandung: Pustaka, 1985)
- Damayanti, Fadelia (Universitas Lampung: Skripsi, 2017)
- Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqur'an, 1985)
- Dapartemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Islam Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup*, ( Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1983)
- Dwihatmojo, Roswidyatmoko, *Ruang Terbuka Hijau yang semakin terpingkiran*, [http://www. bakosurtanal. go](http://www.bakosurtanal.go).

id/assets/download/artikel  
/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakin Terpingkirkan jurnal  
diakses pada tanggal 16 Maret 2020

Erik, Eckholm, *Masalah Kesehatan Lingkungan Sebagai Sumber Penyakit*, (Jakarta: Gramedia, 1983)

Fathoni, Abdurahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Fitriyani Wulandari, Nur Alika (UIN Syarif Hidayatullah: Skripsi, 2017)

Hadi, Purnomo, *Peran Ruang Terbuka Hijau dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*, (Bogor: Disertasi Pascasarjana IPB Bogor, 2017)

Hidayat, Arief dan FX Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*

Iqbal, Muhammad, *Hukum Islam Indonesia Modern*, (Jakarta, 2014)

Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No 2, 2017)

Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun, *RTH 30% ! resolusi (kota) hijau*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Indonesia, *Teologi Lingkungan: Etika Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*, 2011

Mawardi, Muhjiddin, *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama*, [http://www Universitas Muhammadiyah Surakarta.com](http://www.UniversitasMuhammadiyahSurakarta.com). diakses tanggal 1 desember 2020

Mudhofir, Abdullah, *Alquran & Konsevasi Lingkungan, Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Sya'riah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)

Muhjiddin Mawardi, *Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agama*, [http://www Universitas Muhammadiyah Surakarta.com](http://www.UniversitasMuhammadiyahSurakarta.com). diakses tanggal 11 Desember 2020

Nasrobi, wawancara dengan penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 10 Februari 2020

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, Tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tanggal 3 Oktober 2001, Tentang Pembangunan, Penghapusan, dan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandar Lampung.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Pemerintah Daerah atau Pemkot

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor 5 Tahun 2008, Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 Pemerintah Daerah atau Pemkot

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2003)

Rencana Tata Ruang Wilayah Harus Peduli Lingkungan” (Online), tersedia di: <https://www.lampost.co/berita-rtrw-harus-peduli-lingkungan.html> (2 Desember 20120)

Septian, Rio wawancara dengan penulis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 10 Februari 2020

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995)

Sudyohutomo, Mulyono, *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010)

-----, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, cetakan kesatu, 2019)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014)

-----, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

-----, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka cipta, Cetakan kedua, 1993)

Sungin, Burhan *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan kelima, 2011)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003)

Sukarni, *Islam dan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Thalhah, Muhammad dan Achmad Mufid, *“Fiqih Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci (Jawaban Islam atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warming)*, (Yogyakarta: Total Media, 2018)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  
Pasal 1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Nomor 7

Pramadya Puspa, Yan, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990)

Zainuddin, Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, Sudarsono, 2005)

